

## DAMPAK EKONOMI DAN KEBIJAKAN MITIGASI RISIKO BANJIR DI DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA TAHUN 2020

19

Ari Mulianta Ginting

### Abstrak

*Banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa berbagai dampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha, salah satunya adalah dampak ekonomi. Ada tiga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, pertama adalah rusaknya rumah, kendaraan, barang-barang, infrastruktur fisik dan prasarana sosial yang diestimasi mencapai Rp10 triliun lebih. Kedua adalah meningkatnya inflasi pada bulan Januari 2020 akibat volatile foods karena terbatasnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Ketiga adalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ritel yang mencapai Rp1 triliun rupiah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang komprehensif terhadap mitigasi bencana banjir, antara lain: melakukan identifikasi masalah timbulnya banjir, mendesain kebijakan dan strategi untuk mencegah dilanjutkan dengan implementasi kebijakan tersebut. Langkah terakhir adalah evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. DPR RI harus dapat memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat memitigasi risiko banjir agar tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.*

### Pendahuluan

Memasuki tahun 2020, tepatnya pada 1 Januari 2020 terjadi banjir bandang dan longsor yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Lebak, dan Bekasi yang berlangsung beberapa hari (Kompas, 2 Januari 2020). Curah hujan di DKI Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 tersebut menjadi salah satu curah hujan tertinggi dalam sejarah (sepanjang pencatatan hujan di

Jakarta dan sekitarnya sejak pengukuran pertama kali yang dilakukan pada tahun 1866). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya hujan ekstrem yang terjadi merata di Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020. Curah hujan tertinggi mencapai 377 milimeter (mm) per hari, lebih tinggi daripada rekor curah hujan tertinggi pada



Februari 2015 yang tercatat 367 mm per hari (Kompas, 3 Januari 2020), padahal puncak musim hujan diperkirakan BMKG baru akan terjadi pada Februari 2020 mendatang (Koran Tempo, 6 Januari 2020).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa sampai tanggal 6 Januari 2020, sebanyak 67 orang meninggal dunia dan 173.040 orang harus mengungsi. Bencana banjir dan longsor hampir merata di Jabodetabek, yakni 7 titik banjir di Jakarta Barat, 2 titik banjir di Jakarta Utara, 2 titik banjir di Jakarta Pusat, 39 titik banjir di Jakarta Selatan, 13 titik banjir di Kabupaten Lebak, 4 titik banjir di Kota Tangerang, 5 titik banjir di Tangerang Selatan, 12 titik banjir di Kabupaten Bogor, 58 titik banjir di Kota Bekasi, dan 27 titik banjir di Kabupaten Bekasi (BNPB, 6 Januari 2020). Tulisan ini bertujuan mengkaji mengenai dampak banjir di Jabodetabek pada awal tahun 2020 dari perspektif ekonomi dan kebijakan mitigasi resiko banjir agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun mendatang.

### **Dampak Ekonomi Banjir Tahun 2020**

Kerugian ekonomi dari banjir dan longsor yang terjadi sangat besar, mulai dari kerugian langsung seperti rusaknya rumah, baik ringan maupun berat, barang-barang yang rusak dan hilang akibat terkena banjir, sampai dengan mobil dan motor yang terendam air. Banjir juga mengakibatkan rusaknya infrastruktur fisik dan prasarana

sosial, seperti gedung sekolah, rumah ibadah dan puskesmas, serta Bandara Halim Perdana Kusuma yang ditutup sementara dan semua penerbangan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta (Kompas, 7 Januari 2020).

Banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek sejak 1 Januari 2020 hingga sekarang juga berdampak besar bagi perekonomian. Kerugian ekonomi akibat bencana tersebut menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara berbeda dengan banjir pada tahun 2007, mencapai Rp10 triliun lebih (IDX, 3 Januari 2020) Dampak ekonomi banjir yang kedua adalah diperkirakan akan meningkatkan inflasi *volatile foods*, sehingga inflasi dapat meningkat tinggi dan meleset dari target APBN Tahun 2020 sebesar 3,1%. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengungkapkan jika banjir tidak dapat diatasi dengan cepat akan berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pangaruh negatif terhadap inflasi Januari 2020 (Bisnis Indonesia, 6 Januari 2020).

Selain itu, pasokan bahan baku, bahan makanan, dan produk jadi menjadi tidak lancar. Sektor perdagangan besar hingga ritel juga terganggu karena jalur distribusi yang tersendat. Pedagang di pasar tradisional juga kebingungan mendapatkan pasokan barang, khususnya sayuran segar dan komoditas pangan lainnya seperti ikan laut. Pasokan yang tersendat tersebut adalah dampak dari

banjir yang menimbulkan naiknya harga barang di pasar secara signifikan. Hal ini diperparah dengan curah hujan yang tinggi menurut prakiraan cuaca oleh BMKG, baru mencapai puncaknya pada Februari dan Maret (Bisnis Indonesia, 6 Januari 2020).

Dampak ekonomi lainnya adalah kerugian yang dialami oleh pedagang ritel. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mendey menjelaskan kerugian akibat banjir ada dua jenis, yaitu *potential loss* dan *fix loss*. Kerugian *potential loss* dihitung dari kerugian berdasarkan jumlah toko yang tutup akibat banjir dengan jumlah penduduk yang terdampak banjir, serta dengan memperhitungkan rata-rata pengeluaran masyarakat pada akhir tahun 2019. Saat ini, perusahaan ritel anggota Aprindo yang terkena dampak banjir di DKI Jakarta mencapai hampir Rp1 triliun. Sedangkan untuk *fix loss* belum dapat dihitung karena masih menunggu data dari APINDO (Suara Pembaruan, 7 Januari 2020).

### **Kebijakan Publik untuk Mitigasi Bencana Banjir**

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan banjir yang melanda Jabodetabek pada awal tahun 2020 harus dilakukan kebijakan mitigasi untuk mencegah kejadian yang berulang, jatuhnya korban jiwa, dan ratusan ribu orang mengungsi serta kerugian ekonomi. Kepala Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor, Yonvitner menyatakan diperlukan sinergitas kebijakan dan koordinasi antara berbagai pihak untuk

mengantisipasi datangnya banjir. Solusi banjir yang menerjang Jabodetabek harus terintegrasi dari hulu hingga hilir sungai. Di samping itu harus ada koordinasi yang rapi dan baik antara pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (Koran Tempo, 6 Januari 2020).

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memaparkan ada 3 fase yang harus dikerjakan pemerintah pusat untuk menanggulangi banjir, yakni fase hulu, tengah, dan hilir. Pada fase hulu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meneruskan pembangunan bendungan di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor yang dipercepat pada tahun 2020 ini. Saat ini *progress* pembangunan dua bendungan tersebut baru mencapai 45% dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2020. Pada fase tengah, pemerintah melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dan mempercepat penyelesaian sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Kemudian pada fase hilir, pemerintah akan memastikan pompa beroperasi secara maksimal selama 24 jam untuk memompa air ke laut (Republika, 6 Januari 2020).

Terkait dengan penanggulangan bencana dalam perspektif kebijakan publik, Handmer dan Dovers (2007) menjelaskan bahwa proses penanggulangan bencana harus dimulai dengan tahapan berikut: (1) *problem framing*

*discourse*; (2) *policy framing and strategic choice*; (3) *policy design and implementation*; dan (4) *policy monitoring and learning*. Berdasarkan tahapan tersebut, maka dapat dilakukan *problem framing discourse*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan banjir di Jabodetabek dimulai dari hulu, yaitu terjadinya penggundulan pohon secara masif di Puncak Bogor sebagai dampak dari alih fungsi lahan.

Permasalahan yang terjadi di hilir adalah secara geografis DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan dataran rendah dengan kondisi beberapa wilayah terjadi penurunan ketinggian tanah serta curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan program normalisasi daerah aliran sungai (DAS) yang berhenti selama 2 tahun terakhir di DKI Jakarta dan beberapa sungai di Bekasi. Selain itu ditambah lagi ketidaksiapan pompa-pompa air di hilir untuk memompa air ke laut serta meningkatnya ketinggian air pasang laut.

Lebih lanjut terkait permasalahan di hilir adalah perubahan lahan menjadi area terbangun yang telah mencapai tingkat sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Arifasihati dan Kaswanto tahun 2016, signifikansi perubahan lahan di area Jabodetabek dalam satuan DAS tahun 1978 hingga tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dua jenis penutupan lahan yang mendominasi kedua DAS yaitu

area terbangun dan semak. Hal ini tentu berdampak terhadap kemampuan dari DAS menampung aliran air pada saat musim hujan (Kompas, 9 Januari 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah waktunya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan *policy framing* yang dilanjutkan dengan *policy design and implementation* untuk mengatasi banjir agar tidak terulang. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan dihentikannya alih fungsi lahan dan mempercepat pembangunan waduk untuk menahan aliran air yang masuk ke DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang.

Sementara itu untuk permasalahan di hilir, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, dan sekitarnya untuk menormalisasi semua sungai yang ada agar kembali berfungsi secara sempurna serta memastikan bahwa semua pompa-pompa berfungsi secara baik. Setelah kebijakan pencegahan banjir dibuat dan diimplementasikan, maka harus dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut sudah tuntas mengatasi masalah banjir atau belum.

## Penutup

Banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat,

salah satunya adalah dampak ekonomi yang berupa kerugian materil masyarakat dan pelaku usaha. Dampak ekonomi tersebut setidaknya ada tiga hal: *pertama*, banjir mengakibatkan rusaknya rumah, barang-barang, kendaraan bermotor, infrastruktur fisik, dan prasarana umum (sosial) seperti gedung sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan lain-lain. Hasil perhitungan Indef menunjukkan bahwa dampak banjir kali ini lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2007 dengan perkiraan kerugian materil mencapai Rp10 triliun lebih. *Kedua*, adalah terjadinya kenaikan inflasi akibat *volatile foods* hingga terganggunya distribusi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. *Ketiga*, adalah munculnya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ritel, yaitu *potensial loss* dan *fix loss* yang diestimasi mencapai Rp1 triliun.

Sudah waktunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi bencana banjir agar tidak terjadi kembali pada tahun mendatang. Langkah awal dari perspektif kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah penyebab banjir, kemudian membuat pilihan kebijakan, dan dilanjutkan dengan mendesain kebijakan serta implementasi di lapangan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Langkah menyinergikan dan mengoordinasikan pencegahan banjir yang ada di hulu sampai dengan di hilir mutlak dilakukan. Dalam hal ini, DPR perlu

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan banjir dan harus dapat memastikan bahwa kebijakan mitigasi bencana khususnya banjir yang terjadi di Jabodetabek dapat dilaksanakan dengan baik.

### Referensi

- “Akar Masalah Banjir”, *Republika*, 6 Januari 2020, hal. 21.
- “Banjir Diyakini Tidak Kacaukan Pengendalian Inflasi 2020”, *Bisnis Indonesia*, diunduh <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200105/9/1187084/banjir-diyakini-tidak-kacaukan-pengendalian-inflasi-2020>, diakses 8 Januari 2020.
- Handmer, John dan Dovers, Stephens. (2007). *The Handbook of Disaster and Emergency Policies and Institutions*. London: Eathscan.
- “Krisis Iklim dan Banjir Jakarta”, *Kompas*, 3 Januari 2020, hal 1.
- “Manufaktur Siap Pacu Produksi”, *Bisnis Indonesia*, 6 Januari 2020, hal. 1.
- “Mengurai Penyebab Banjir Besar di Jakarta”, *Kompas*, 9 Januari 2020, hal. A.
- “Pusat dan Daerah Diminta Rancang Solusi Banjir Terintegrasi”, *Koran Tempo*, 6 Januari 2020, hal. 2.
- “Ritel Modern Rugi Hampir Rp 1 Triliun Akibat Banjir”, *Suara Pembaruan*, 7 Januari 2020, hal. 26.



"Rugi Rp10 Triliun, Dampak Banjir Awal Tahun 2020", IDX, 3 Januari 2020, diakses dari <https://www.idxchannel.com/market-news/rugi-rp10-triliun-dampak-banjir-awal-tahun-2020>, tanggal 7 Januari 2020.

"Serius Memitigasi Bencana Banjir", *Kompas*, 7 Januari 2020, hal. 1.

"Utamakan Evakuasi Warga", *Kompas*, 2 Januari 2020, hal. 1.

"Update Data Penanganan Banjir Jabodetabek dan Lebak 6 Januari 2020", diunduh dari <https://www.bnpb.go.id/update-data-penanganan-banjir-jabodetabek-lebak-6-januari-2020-pukul-0800-wib>, tanggal 8 Januari 2020



Ari Mulianta Ginting  
[ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id).

---

Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (2006) dan Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008). Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti sejak tahun 2017. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia", "Pengaruh Perkembangan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", dan "Pengaruh Ketimpangan Pembangunan antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013".

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.